

Analisis Istilah Khas dalam Wacana Politik Pemilu 2024 Implikasi Terhadap Pendidikan Politik Di Era Digital

Author: Zahy Riswahyudha Ariyanto¹⁾, Atiqa Sabardila²⁾

Correspondence: Universitas Muhammadiyah Surakarta¹⁾²⁾ / a310210153@student.ums.ac.id¹⁾, as193@ums.ac.id²⁾

Article history:

Received

Agustus 2023

Received in revised form

Agustus 2023

Accepted

September 2023

Available online

September 2023

Keywords:

Special terms, Politics, Education.

DOI

<http://dx.doi.org/10.23960/Kata>

Abstract

Political education for youth today is very important. It is necessary to innovate in the current era of information technology openness to achieve optimal political education goals. This type of research is descriptive qualitative. The data source for this research is the Discourse rubric of ideas about elections contained in Koran Tempo's digital news page. The data in this study are typical terms in the field of politics or political registers. Data was collected through the observing and note-taking method, then analyzed using the referential equivalent method. The validity of the data was tested using theoretical triangulation. The results are (1) Typical terms or political registers on the Koran Tempo digital news page are dominated by types of nouns or nouns, for example Cabinet, Period, Parliament, Sympathizers, Politicians, Ministers, Camps, Parties, Candidates, Legislators, there are also types of verbs or verbs namely Polarization, Authoritarianism, Press Conference, Controversy, Democracy, Electability, Coalition, Credibility, Integrity. Democratic Campaign, (2) The findings in the first problem formulation are then used as political education content through social media for teenagers, especially students as innovation in an era of openness and advances in information technology.

Abstrak

Pendidikan politik bagi remaja saat ini sangat penting dilakukan. Perlu diadakan inovasi di era keterbukaan teknologi informasi saat ini untuk mencapai tujuan pendidikan politik yang optimal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah Wacana tentang pemilu yang terdapat dalam laman berita digital Koran Tempo. Data dalam penelitian ini adalah istilah khas dalam bidang politik atau register politik. Data dikumpulkan melalui metode simak dan catat, kemudian dianalisis menggunakan metode padan referensial. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teori. Hasilnya yaitu (1) Istilah khas atau register politik dalam laman berita digital Koran Tempo didominasi oleh jenis kata benda atau nomina, contoh Kabinet, Periode, Parlemen, Simpatisan, Politikus, Menteri, Kubu, Partai, Kandidat, Legislator, terdapat juga jenis kata kerja atau verba yaitu Polarisasi, Otoritarianisme, Konferensi Pers, Kontroversi, Demokrasi, Elektabilitas, Koalisi, Kredibilitas, Integritas. Demokratis. Kampanye, (2) Hasil temuan dalam rumusan masalah pertama, selanjutnya dijadikan konten pendidikan politik melalui media sosial bagi remaja khususnya pelajar sebagai inovasi di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi.

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kepedulian remaja khususnya pelajar terhadap politik, yaitu angka partisipasi pemilu pemilih pemula. Jika angka partisipasi pemilih pemula tinggi, maka para remaja khususnya pelajar memiliki kepedulian terhadap politik. Pendidikan politik juga dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan gairah remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Menurut Wanma (2015) problematika kurangnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik di Indonesia sebenarnya berlawanan dengan potensi dan kekuatan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang kuat. Kuantitas penduduk Indonesia yang cukup kuat merupakan potensi unggulan yang perlu diberdayakan jika ingin menjadi sebuah negara demokrasi yang unggul di dunia.

Pendidikan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Salah satu yang biasanya dilakukan yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Cara ini memiliki keterbatasan karena materi yang disampaikan dibatasi oleh kurikulum, selain itu keterbatasan yang lain yaitu banyak guru yang menggunakan pembelajaran konvensional dalam menyampaikan materi yaitu dengan ceramah.

Pendidikan politik yang instan sering dilakukan saat mendekati pemilu. Saat

mendekati pemilu ada duta pemilu atau relawan pemilu melakukan pendidikan politik dengan cara melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan dan seputar pemilu. Hasil kegiatan ini sampai saat ini dianggap baik tetapi cara ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki yaitu ruang (tempat), waktu, dan sumber daya manusia maupun jumlah sasaran. Tidak semua remaja mendapatkan informasi terkait kegiatan sosialisasi ini. Maka dibutuhkan ruang yang lebih luas lagi agar eksplorasi siswa dalam mempelajari pendidikan politik lebih komprehensif lagi. Perkembangan dunia internet saat ini membuat semua hal menjadi lebih mudah, baik dari segi, pencarian informasi, berinteraksi sosial tanpa batasan jarak, dan tentunya mempermudah dalam melakukan kegiatan promosi baik produk maupun dalam bentuk penawaran jasa. Banyak situs maupun aplikasi yang ditawarkan dengan adanya internet (Putra, 2019)

Menurut Bushor (2018), pendidikan politik merupakan bagian penting dari kekuatan demokrasi. Minimnya pengetahuan tentang isu-isu politik dan aktivitas politik membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap berbagai prosesi demokrasi dan dinamika politik dan pemerintahan di sekitarnya. Dengan kata lain, pendidikan politik merupakan perpaduan antara pengetahuan,

keterampilan, dan sikap terhadap politik (Bakri et al. 2012).

Pendidikan politik memerlukan strategi atau metode yang baru yang lebih efektif. Strategi yang digagas musti ramah terhadap objek sasaran dan ramah terhadap perkembangan zaman. Perkembangan zaman saat ini memasuki era 4.0. Di era ini keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi sangat pesat. Dengan demikian pendidikan politik dituntut untuk menyesuaikan keterbukaan dan kemajuan bidang informasi dan teknologi. Menurut Wasburn (2017), sosialisasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, tempat kerja, kelompok sosial dan melalui media. Media digital merupakan tempat yang strategis untuk memperluas pengetahuan politik publik.

Penelitian ini memberikan alternatif solusi tentang pendidikan politik di era 4.0. Salah satu solusi yang merupakan inovasi yang ditawarkan yaitu pendidikan politik melalui media sosial dengan konten istilah khas dalam bidang politik. Melalui istilah khas dalam bidang politik remaja mampu mengetahui dan memahami tentang definisi, seluk beluk, dan ruang lingkup yang tak terbatas serta terjadi komunikasi internal yang mendorong remaja untuk mencari tahu kepada yang ahli dalam bidang politik,

Alternatif ini mencoba melengkapi dan memperbaiki keterbatasan strategi pendidikan politik yang dipaparkan di atas. Keterbatasan pada materi pendidikan kewarganegaraan dan keterbatasan sosialisasi pemilu. Tentu alternatif ini bersifat melengkapi dasarnya adalah pendidikan di sekolahan yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang naturalistik artinya bahwa penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2012). Maksud dari kondisi alamiah yang sesuai fakta dengan data dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada manipulasi data.

Strategi dalam penelitian ini menggunakan strategi terpancang. Maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai istilah khas dalam bidang politik wacana pilpres 2024 di Koran Koran tempo yang selanjutnya digunakan untuk pendidikan politik bagi remaja melalui media sosial.

Subjek dalam penelitian ini berupa wacana tentang pilpres yang terdapat dalam koran Koran *tempo* edisi 2022. Objek dalam penelitian kualitatif berupa hal yang akan dikaji atau diteliti. Maka dari itu, objek penelitian harus sesuai dengan rumusan

masalah dan fokus penelitian. Objek penelitian ini berupa istilah khas (register) dalam bidang politik yang dianalisis berdasarkan bentuk bahasa dan maknanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan register dalam wacana politik pemilu 2024 yang terdapat dalam laman berita digital koran tempo dan penerapannya sebagai konten edukasi melalui media digital.

1. Istilah Khas dalam Wacana Politik dan Arti Leksikalnya.

Istilah khas dalam bidang tertentu disebut juga sebagai register. Register ialah seperangkat perbendaharaan kata yang berkaitan dengan ciri khas pekerjaan dan kelompok masyarakat (Pateda, 2015). Menurut Alwasilah (1985), register memiliki beberapa bahasa, yang penggunaannya khusus untuk pengguna. Jenis karya yang memiliki hubungan dengan penggunaan bahasa disebut register (Pateda, 2015). Jadi bahasa yang digunakan antara satu jenis pekerjaan berbeda. Hal ini juga dilaporkan oleh (Alwasilah, 1993) Bahasa register ini adalah bahasa lain yang penggunaannya didasarkan pada penggunaan bahasa ini. Perbendaharaan kata yang dikaji dalam pembahasan ini adalah perbendaharaan khas

dalam kelompok politik. Perbendaharaan ini disebut sebagai register politik. Perbendaharaan yang khas ini didapatkan dari sumber data wacana politik pada laman berita digital Koran tempo. Adapun register yang terdapat dalam koran tempo didominasi oleh jenis kata benda atau nomina. Nomina yang terdapat dalam wacana politik laman koran tempo ialah Kabinet, Periode, Parlemen, Simpatisan, Politikus, Menteri, Kubu, Partai, Kandidat, Legislator. Selain nomina terdapat juga register dari jenis kata kerja atau verba. Register dari jenis Verba ialah Polarisasi, Otoritarianisme, Konferensi Pers, Kontroversi, Demokrasi, Elektabilitas, Koalisi, Kredibilitas, Integritas. Demokratis, Kampanye.

a. Register dari Jenis Nomina

1) Kabinet

Dalam menjalankan tugas kenegaraan, seorang presiden dibantu oleh sebuah perangkat yang akan membantu presiden dalam menjalankan tugas kepresidenan. Perangkat tersebut dibentuk oleh presiden terpilih untuk membantunya dalam menjalankan tugas. presiden terpilih akan merancang kabinetnya dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan selama 5 tahun (Wijaya, 2019)

Koalisi Indonesia Bersatu mengatakan tak akan tergesa-gesa mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil

presiden untuk pemilihan presiden 2024. Disebut-sebut menawarkan jabatan di kabinet kepada partai oposisi. (Menangkal Hoaks Pemilu lewat Satgas, Koran Tempo. Jumat, 21 Oktober 2022.)

Kata Kabinet termasuk dalam register politik. Kata Kabinet adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata kabinet memiliki makna leksikal yaitu Badan atau dewan dalam pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah suatu badan atau lembaga yang terdiri dari pejabat pemerintahan dan mewakili cabang eksekutif.

2). Periode

Setiap masa kepemimpinan memiliki jangka waktu berlangsungnya waktu pemerintahan. Pada umumnya periode pemerintahan seorang presiden berlangsung kurang lebih 5 tahun, yang dapat dipilih kembali satu periode. Setiap masa pergantian kepala pemerintahan akan dilakukan pemilihan langsung yang akan melibatkan masyarakat pada daerah tersebut. Setelah dilakukan pemilihan umum, yang akan menghasilkan seorang pemimpin baru, maka pemimpin tersebut akan mengemban amanah selama satu periode.

Upaya memperpanjang masa kekuasaan Presiden Joko Widodo belum surut. Setelah wacana presiden tiga periode, kini muncul ide agar presiden bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024. (Cara Pendukung

Pertahankan Kekuasaan, Koran Tempo. Rabu, 20 September 2022.)

Kata Periode termasuk dalam register politik. Kata Periode adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata Periode memiliki makna leksikal yaitu kurun waktu; lingkaran waktu (masa). Kurun waktu masa jabatan pemerintahan. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah masa jabatan dalam pemerintahan.

3). Parlemen

Presiden dalam menjalankan tugasnya tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan secara individu. Tugas kenegaraan sangat kompleks tentu tidak bisa dikerjakan sendiri. Seorang kepala negara membutuhkan bantuan sebuah jajaran yang akan membantu berbagai aspek urusan kenegaraan. Badan tersebut bekerja dengan menaungi aspirasi rakyat. Badan tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan perwakilan Rskyat ini dihimpun dalam sebuah parlemen. Parlemen ini memuat jajaran anggota perwakilan rakyat. Parlemen merupakan bagian – bagian terpenting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintan demokrasi (Haris, 2014).

Sikap Joko Widodo dinilai tidak tegas ihwal rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Partai – partai di parlemen menolak ide Jokowi tiga periode. (Satu Suara Tolak Tiga Periode, Koran Tempo. 05 September 2022.)

Parlemen termasuk dalam register politik. Kata parlemen adalah istilah khusus

dalam bidang politik. Kata Parlemen memiliki makna leksikal yaitu Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah badan dalam lembaga pemerintahan.

4). Menteri

Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Menteri merupakan pembantu Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saraswati, 2013).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewajiban menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri dalam pencalonan presiden dikhawatirkan akan meningkatkan potensi pelanggaran kampanye. Presiden Joko Widodo didesak segera encopot menteri yang berniat maju dalam pemilihan presiden 2024. (Pesta Demokrasi Rawan Dikorupsi, Koran Tempo. Kamis, 02 November 2022.)

Menteri termasuk dalam register politik. Kata Menteri adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata Menteri memiliki

makna leksikal yaitu Kepala suatu departemen (anggota kabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah lembaga yang bertugas membantu tugas kepala negara dalam urusan kenegaraan.

5). Simpatisan

Seorang calon kandidat yang ingin berkompetisi dalam kontestasi politik akan memiliki pendukung yang akan bersedia dalam mendukung seorang capres. Orang – orang ini akan bersedia memberikan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk membela kandidat yang dipilihnya. Orang - orang ini walaupun tidak terlibat dalam partai politik namun turut serta dalam mendukung masa kampanye seorang calon presiden. Orang – orang ini dinamakan simpatisan. strategi dalam kampanye politik tak ubahnya strategi pemasaran bisnis. Bedanya, dalam kampanye politik analisa kebutuhan didasarkan pada masyarakat dan pemilih. Produknya merupakan kombinasi dari kandidat itu sendiri, citra politiknya, dan para pendukung yang mempromosikan dan menyampaikannya (Zulham, 2017).

Deklarasi juga tengah disiapkan oleh simpatisan Anis Baswedan. Survei elektabilitas mulai mengerucuk ke dominasi tiga tokoh.. (Pemanasan Disokong Simpatisan, Koran Tempo. 23 September 2022.)

Kata simpatisan termasuk dalam register politik. Kata simpatisan adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata simpatisan memiliki makna leksikal yaitu Orang yang bersimpati (kepada partai politik dan sebagainya) Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah sekumpulan orang yang memiliki perhatian khusus pada suatu bidang(partai politik dan sebagainya).

6). Politikus

Seseorang yang terlibat dalam politik. Dan itu termasuk politisi. Politisi juga termasuk tokoh politik yang berpartisipasi dalam pemerintahan.

Poros-poros pendukung bakal calon presiden 2024 mulai bemunculan. Di lingkup internal PDIP, gerakan sejumlah politikus penyokong Puan Maharani mendapat tantangan dari relawan Ganjar Pranowo..(Pemanasan Disokong Simpatisan, Koran Tempo.23 September 2022.)

Kata politikus termasuk dalam register politik. Kata politikus adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata politikus memiliki makna leksikal yaitu Orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang njutnya kata ini nanti akan disosialisasikan melalui akun media sosial sebagai kontepat ialah seseorang yang terlibat dalam bidang politik atau berkarier dalam bidang pilitik.

b. Register Dari Jenis Verba

1) Polarisasi

Ambisi menjadi pemenang dalam kontestasi politik mengharuskan adanya persaingan diantara para kontestan politik. Pada situasi tersebut para kontestan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan sebuah dukungan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah membangun koalisi, sehingga menyebabkan terjadinya polarisasi. bahwa polarisasi politik memang bisa muncul karena faktor identitas, tetapi mereka lebih menyoroti faktor lain, yakni persepsi atas pengelolaan kekuasaan (Karim, 2019).

Pemerintah berencana membentuk satuan tugas digital untuk mencegah disinformasi dan polarisasi pada Pemilu 2024. Satgas yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bakal mengawasi setiap informasi seputar pemilu yang beredar di media sosial. (Menangkal Hoaks Pemilu lewat Satgas, Koran Tempo. Jumat, 21 Oktober 2022.)

Kata Polarisasi termasuk dalam register politik. Kata Polarisasi adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata Polarisasi memiliki makna leksikal yaitu Pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah terjadinya pembagian kelompok yang berbeda tujuan.

2) Otoritarianisme

Bentuk pemerintahan yang dianut oleh kepala negara sangat berpengaruh terhadap berjalannya sebuah negara dan kemakmuran rakyatnya. Bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Menurut Kurniyatillah, dkk (2020) kepemimpinan otoriter adalah keinginan pemimpin yang memimpin dengan aspek negatif semisal pemaksaan, hukuman dan rutinitas manajemen yang tidak sehat.

Ada kecurigaan bahwa satgas digital digunakan pihak-pihak tertentu sebagai alat politik untuk Pemilu 2024. Gejala otoritarianisme yang ditunjukkan pemerintah menguat dalam beberapa tahun terakhir. (Mewaspadaai Pembentukan Satgas Pengawas, Koran Tempo. Jumat, 21 Oktober 2022.

Kata Otoritarianisme termasuk dalam register politik. Kata Otoritarianisme adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata kontroversi memiliki makna leksikal yaitu Berkuasa sendiri; sewenang-wenang. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah tindakan dari seorang pemimpin yang sesuka hatinya, demi kepentingannya.

3) Konferensi Pers

Rertemuan yang diselenggarakan oleh calon kandidat presiden dengan mengundang para wartawan atau reporter dengan tujuan untuk menyampaikan sejumlah informasi

beserta penjelasan secara bertanyajawab kampanye politik atau suatu pernyataan yang harus diketahui oleh publik. Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Konferensi bisnis, pertemuan untuk membahas masalah bisnis.

Reaksi paling keras ditunjukkan oleh Sekretaris Jedral Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Bahkan ia secara khusus menggelar konferensi pers untuk menanggapi pernyataan SBY itu. (Menerka Mnuver Demokrat Lewat Pernyataan SBY, Koran Tempo, Sabtu, 24 September 2022)

Kata Konferensi Pers termasuk dalam register politik. Kata Konferensi Pers adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata kontroversi memiliki makna leksikal yaitu Pertemuan pers yang diadakan oleh seorang tokoh untuk memberitahukan hal yang penting di hadapan wartawan dan utusan kantor berita untuk disebarluaskan melalui media massa. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah pertemuan resmi yang diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada publik.

4) Kontroversi

Situasi politik terkadang memanas jika terjadi pertentangan dan persaingan antara masing – masing kubu. Keadaan pertentangan debat publik yang berkepanjangan, biasanya menyangkut masalah pendapat atau sudut pandang yang bertentangan. Baik yang terjadi

pada individual dan kelompok. Menurut Purnomo, dkk (2016) Kontroversi adalah suatu kondisi dimana suatu materi memiliki beberapa sudut pandang yang saling berkontradiksi, akan tetapi pandangan-pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama-sama kuat.

Proporsionalitas anggaran pemilu sulit diukur karena informasi tentang perencanaan detail penggunaan anggaran sangat terbatas. Karena itu, isu tentang anggaran pemilu sudah menimbulkan kontroversi dan spekulasi (Mencermati Kebutuhan Anggaran Pemilu, Koran Tempo. Rabu, 12 Oktober 2022.)

Kata Kontroversi termasuk dalam register politik. Kata Kontroversi adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata kontroversi memiliki makna leksikal yaitu Persengketaan, pertentangan, perdebatan. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah peristiwa terjadinya perselisihan pendapat, sehingga terjadi sebuah perdebatan dan pertentangan antar kedua belah pihak yang bersangkutan.

5) Kredibilitas

Seorang calon kepala negara yang akan berkompetisi dalam kontestasi politik harus memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara yang memenuhi berbagai kriteria utama. Kualifikasi tersebut harus dipenuhi oleh seorang calon kepala negara. Untuk mendapatkan kualitas tersebut seorang calon harus memiliki kredibilitas. Menurut Malik

(2017) kredibilitas merupakan persepsi kualitas yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu kepercayaan dan keahlian.

Pemerintah menyetujui adanya kenaikan honor untuk badan ad hoc Pemilihan Umum 2024. Perlu strategi lain untuk meningkatkan efektivitas, kredibilitas, dan integritas panitia pemilihan. (Kenikan Honor Panitia Pemilu Bukan PR Terakhir, Koran Tempo. Rabu, 10 Agustus 2022.)

Kata Kredibilitas termasuk dalam register politik. Kata Kredibilitas adalah istilah khusus dalam bidang politik. Kata kredibilitas memiliki makna leksikal yaitu Perihal dapat dipercaya. Berdasarkan konteks di atas pengertian yang tepat ialah perihal tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dipercaya.

2. Proses Pendidikan Politik Melalui Media Sosial Dari Hasil Identifikasi Istilah Khas

Berdasarkan hasil penelitian mengenai register politik wacana pilpres yang di ambil dari Koran tempo, telah didapatkan makna dari masing-masing register yang dicari melalui KBBI. Selanjutnya register beserta maknanya akan dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh remaja/pelajar yaitu melalui media sosial diantaranya Facebook, Instagram, YouTube. Media sosial dipilih karena remaja/pelajar masa kini gemar menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial.

Media sosial tidak hanya sebagai media hiburan saja, namun juga mampu menjadi

media edukasi di tengah masa globalisasi. Media sosial menjadi tempat yang sangat efektif dan efisien untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, karena sifatnya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun setiap orang bisa mengakses konten pendidikan melalui media sosial. Menurut Firamadhina dan Krisnani (2020) Perilaku Generasi Z dalam menggunakan media sosial salah satunya TikTok sebagai media penyaluran konten edukasi dan aktivisme merupakan suatu perilaku manusia dalam periode umur remaja yang inovatif dan kreatif. Media sosial memiliki potensi untuk mendukung edukasi dengan cara yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu (Contreras-Castillo et al 2006;. Hrastinski 2006).

Selaras dengan masifnya pemakaian media sosial saat ini, membuat kemunculan situs media sosial dapat digunakan untuk berbagai macam hal, salah satunya dapat menjadi pendorong dalam mendukung dan memaksimalkan pembelajaran di bidang pendidikan yaitu sebagai media penyajian konten pendidikan atau pembelajaran digital. Menurut Seattler (2004:4), “fungsi teknologi pendidikan secara historis, adalah sebuah proses daripada sebuah produk.

Hasil penelitian akan di publikasikan melalui media sosial supaya remaja/pelajar yang sedang bermain media sosial dapat melihat dan memahami postingan mengenai

register politik sehingga akan terwujudnya pendidikan politik bagi remaja/pelajar khususnya yang telah berusia 17 tahun sebagai pemilih pemula supaya mengetahui istilah-istilah dalam bidang politik.

Pendidikan politik terjadi saat remaja khususnya pelajar membaca konten yang berupa istilah khas dalam bidang politik di media sosial. Dengan membaca konten ini maka akan terjadi proses penggalian pengetahuan tentang makna istilah. Jika remaja tersebut tidak paham atau ingin mencari tahu lebih dalam terkait dengan makna istilah tersebut bias dikomunikasikan dengan admin media sosial. Pengetahuan yang belum dapat dimengerti secara sempurna juga bisa dikonfirmasi oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Keuntungan yang di dapat pendidikan politik melalui media sosial

1. Semua remaja memiliki akun media sosial sehingga mudah di akses
2. Tidak terdapat keterbatasan ruang dan waktu
3. Melalui desain atau konten yang menarik dari berbagai dimensi sudut pandang
4. Terjalin komunikasi yang terarah berbagai pengguna melalui kolom komentar.

Menurut Ramdani, dkk (2021), gaya hidup generasi muda atau yang sering disebut

dengan generasi Z, penggunaan smartphone meliputi mencari informasi, membeli dan membeli secara online. Tentu saja, termasuk mengakses media sosial dan menggunakannya untuk mendapatkan materi pelajaran yang saat ini didukung oleh banyak konten pendidikan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat dua simpulan dalam karya tulis ini. Istilah khas dalam bidang politik disebut sebagai register politik. Adapun register yang terdapat dalam wacana politik di Koran tempo didominasi oleh jenis kata benda atau nomina. Nomina yang terdapat dalam wacana politik laman berita digital Koran tempo ialah Kabinet, Periode, Parlemen, Simpatisan, Politikus, Menteri, Kubu, Partai, Kandidat, Legislator. Selain nomina terdapat juga register dari jenis kata kerja atau verba. Register dari jenis Verba ialah Polarisasi, Otoritarianisme, Konferensi Pers, Kontroversi, Demokrasi, Elektabilitas, Koalisi, Kampanye, Kredibilitas, Integritas. Demokratis.

Hasil temuan dalam rumusan masalah pertama, selanjutnya dijadikan bahan referensi dalam memproduksi konten pendidikan politik melalui media sosial bagi remaja khususnya pelajar sebagai inovasi di era keterbukaan dan kemajuan teknologi

informasi. Pemahaman mengenai pendidikan politik akan lebih mudah diterima oleh khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdar, Y. (2018). Koalisi Partai Politik dalam UU NO 10 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 266138.
- Alwasilah, A. Chaedar. (1993). *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa
- Aswadi, E. S. (2017). Penggunaan Register Berupa Nomina di Kalangan Pedagang Tradisional Pasar Terapung Kota Banjarmasin. *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2(2), 210-221.
- Bakri, A. F., et al. (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Benuf, K. (2018). Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila. *Gema Keadilan*, 5(1), 85-92.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287-310.
- Chaer, A. (2012.). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Contreras-Castillo, J., Perez-Fragoso, C., & Favela, J. (2006). Assessing The Use of Instant Messaging in Online Learning Environments. *Interactive Learning Environments*, 14(3), 205–218.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok:



- TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 199-208.
- Hadi, I. (2017). Register Pedagang Buah: Studi Pemakaian Bahasa Kelompok Profesi di Kota Padang. *METALINGUA*, 15 (1), 25-40.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hima, R. (2017). Register Istilah dalam Bidang Pemasaran. *e-ISSN 2503-0329*, 2 (1), 69-76.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *POLITIKA*, 10 (2)
- Kridalaksana, H. (1982). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pusaka.
- Ngalim, A. (2013). *Sosisolinguistik*. Surakarta: PBSID UMS.
- Kurniyatillah, N., Rachmawati, S. E., Amirah, A., & Sulaiman, N. S. (2020). Kepemimpinan Otoriter dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1), 160-174.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Malik, H. A. (2017). Naqd Al-Hadits sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 37-66
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar. *Jurnal Diakom*, 2(1), 120-128.
- Paramitasari, A. (2014). "Register Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan: Kajian Sosiolinguistik". *Jurnal Seloka*, 3 (2), 110-114.
- Pateda, M. (2015). *Sosiolinguistik, Cetakan Pertama*. Bandung: Angkasa.
- Purnomo, A., Muntholib, A., & Amin, S. (2016). Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Materi Kontroversi (*Controversy Issues*) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 33(1), 13-26.
- Putra, G. L. A. K. (2019). Pemanfaatan Animasi Promosi dalam Media Youtube. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 2, pp. 259-265).
- Poedjosoedarmo, S. (2001). *Filsafat Bahasa. Cetakan Pertama* Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ramdani, N. S., Nugraha, H., & Hadiapurwa, A. (2021). Potensi Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Daring. *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(02), 425-436.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97-103.
- Seattler, P. (2004). *The Evolution of American Educational Technology*. California State University



Sacramento: Information age publishing

Numfor. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1123.

Sudaryanto, M. S. (2014). Register Anak Jalanan Kota Surakarta. *Jurnal BASASTRA*, 1(3), 514-528.

Wasburn, Ph. C., T. J. A. Covert. (2017). *Making Citizen*. New York: Palgrave Macmillan.

Suherli, M. S. (2016). *Bahasa Indonesia Kelas X SMA/MA/SMK/MAK*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Wijaya, A. (2019). Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif. *Al Ahkam*, 15(2), 69-80.

Wahyudi, A. B. (2017). *Register Bahasa*. Surakarta: Bukukatta.

Zulham, M., & Fazil, M. (2017). Komitmen Partisipan Parlok dalam Menjaga Perdamaian Pilkada Serentak: Studi Partai Aceh (Pa) Kabupaten Aceh Utara. In *Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Ptn Se-Indonesia*.

Wanma, A. V. (2015). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak